

## DAFTAR PUSTAKA

- Admin. (2007). "Visi dan Misi Kementerian Agama". Surabaya: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.
- Albar, M., Morasa, J., & Walandouw, S. K. (2018). Analisis Perlakuan dan Pelaporan Akuntansi Barang milik Negara Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 125-126.
- Humas PKN. 2019. "Desiminasi Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara". Tangerang Selatan: PKN STAN.
- Imansah, R. K. (2020). *Penguatan Kapasitas Perencanaan Program dan Anggaran Kementerian Agama*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama. (2010). *Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama*. Jakarta.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (26 Maret 2021). *Sekilas Tentang Kementerian Agama*. Diakses tanggal 21 April 2022, dari <https://kemenag.go.id/artikel/sejarah>
- Kementerian Keuangan. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara*. Jakarta.
- Kementerian Keuangan. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.05/2016 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama*. Jakarta
- Kolinug, M. S., Ilat, V. I., & Pinatik, S. (2015). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(1).
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2021). *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Akuntansi aset Tetap*.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2014). *Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua*
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2006). *Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah*.

- Margono. 2016. "DTSS Pengelolaan Barang Milik Negara Bagi Pengguna Barang". Tangerang Selatan: Pusdiklat Kekayaan Negara Dan Perimbangan Keuangan.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.
- Tipan, A., Saerang, D. P., & Lambey, R. (2016). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 58.
- Wibisono, A. (2019). "Memahami Metode Penelitian Kualitatif". Jakarta Pusat: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara